

**PERUBAHAN RENSTRA  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2019 - 2024**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kabupaten Magelang.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan, agar dapat berkesinambungan, sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yaitu, melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Perhubungan.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebagai dokumen perencanaan bidang perhubungan dan Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Akhirnya kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna meskipun demikian kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang selama 3 (tiga) tahun kedepan secara berkesinambungan, dan kami berharap juga Renstra ini dalam pelaksanaannya nanti dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya Visi Kabupaten Magelang dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701115 199003 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2019 - 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Kota Mungkid,

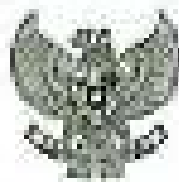
2021

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Magelang



Imam Rasmi, S.Sos., M.Si

NIP. 19701115 199003 1 003



**BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 35 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
  - bahwa dengan ditemukannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rencana PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Perbisa Tingkat I

NIP. 196807301997082003

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	II-8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	II-8
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	II-15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	II-22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-36
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG.....	III-38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	III-38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang.....	III-38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..	III-40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-53
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-54
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-54
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-55
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-56
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	V-56
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-59
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	VII-63
BAB VIII : PENUTUP.....	VIII-79

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Kelompok Jabatan.....	II-15
Tabel 2.2	: Data Sumber Daya Manusia pada Bidang Teknik dan Prasarana Sarana sesuai Kelompok Jabatan Tahun 2021.....	II-16
Tabel 2.3	: Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Magelang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	II-17
Tabel 2.4	: SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Menurut Golongan.....	II-18
Tabel 2.5	: SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin.....	II-19
Tabel 2.6	: Data rekonsiliasi Aset Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020.....	II-20
Tabel 2.7	: Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020.....	II-21
Tabel 2.8	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.9	: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan.....	II-25
Tabel 2.10	: Anggaran dan Realisasi Program Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.11	: Data prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan jalan Tahun 2017-2020.....	II-33
Tabel 2.12	: Pengelolaan Terminal Tahun 2017-2020.....	II-34
Tabel 2.13	: Jumlah Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum dan Jumlah Juru Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2017-2020.....	II-35
Tabel 2.14	: Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Kendaraan Tahun 2017-2020.....	II-36
Tabel 3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	III-38
Tabel 3.2	: Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang.....	III-40
Tabel 3.3	: Telaah Renstra K/L dan Rentsra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-41
Tabel 3.4	: Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	III-46
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	IV-55
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-57
Tabel 7.1	: Penetapan indikator utama dinas perhubungan kabupaten magelang tahun 2019 - 2024.....	VII-63
Tabel 7.2	: Indikator kinerja perangkat daerah Yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpjmd .....	VII-64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.....	I-2
Gambar 2.1	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan.....	II-9
Gambar 2.2	: Komposisi SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Kelompok Jabatan.....	II-15
Gambar 2.3	: <i>Komposisi</i> Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Magelang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	II-17
Gambar 2.4	: Komposisi SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Menurut Golongan.....	II-18
Gambar 2.5	: Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin.....	II-19
Gambar 2.6	: Situasi lalu lintas di Jalan Mayjen Sugeng.....	II-33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

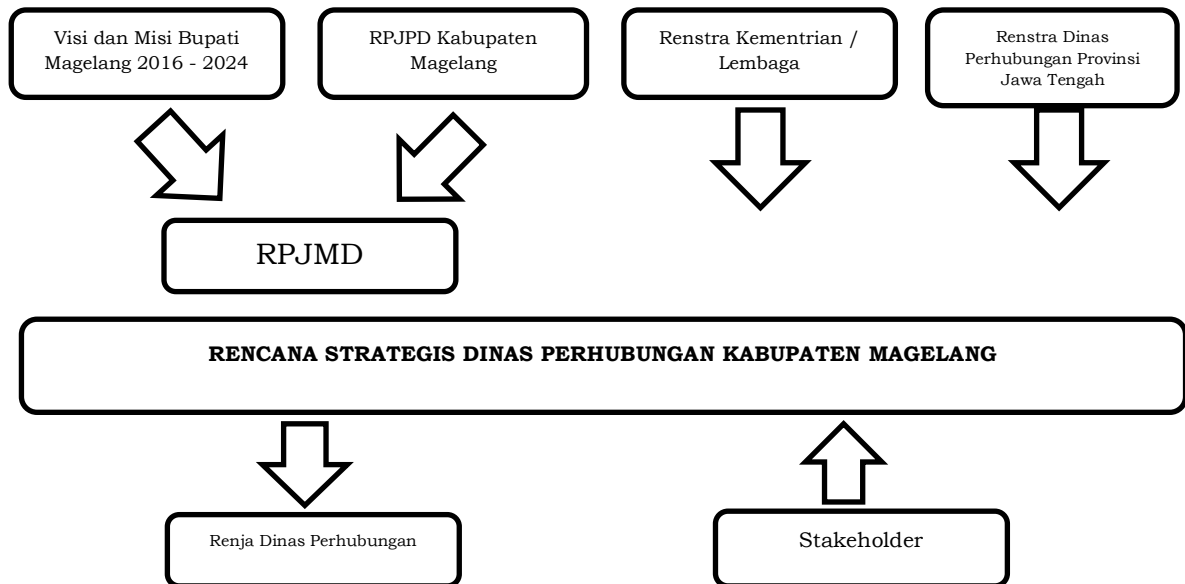
### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah dibuat paling lama satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, sedangkan proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan renstra perangkat daerah, (2) penyusunan renstra perangkat daerah, (3) penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah, (4) penetapan renstra perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD). Penyusunan ini mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sehingga menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.

Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi / Kab. / Kota dan Renja Perangkat Daerah

Awal tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra terjadi pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global dan regional Kabupaten Magelang, termasuk disektor Perhubungan. Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020, dan di Kabupaten Magelang kasus positif Covid-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 15 Maret 2020.

Sektor perhubungan yang selama ini berkontribusi pada ekonomi Kabupaten Magelang menjadi salah satu sektor yang terdampak, sehingga indikator yang sudah dirancang mengalami pertumbuhan, akan terjadi penurunan. Selain itu pandemi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat, antara lain menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan retribusi di sektor perhubungan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi Covid-19.

Ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, serta dengan mempertimbangkan menerbitkan PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara otomatis menggantikan PP No. 58 Tahun 2005.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukannya Perubahan Rencana Strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang. Perubahan Rencana Strategis tersebut nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 55).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Maksud dari dilakukan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024 untuk keterpaduan dan sinergi yang baik dalam hal penyusunan rencana, penganggaran dan evaluasi guna mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra, sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (SDM, aset/modal), memuat struktur organisasi, tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) serta tupoksi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi terkait visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai visi dan misi dan kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dan tahun 2019-2024 harus jelas menunjukkan yang menjadi cita-cita layanan terbaik Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah

dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam empat tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

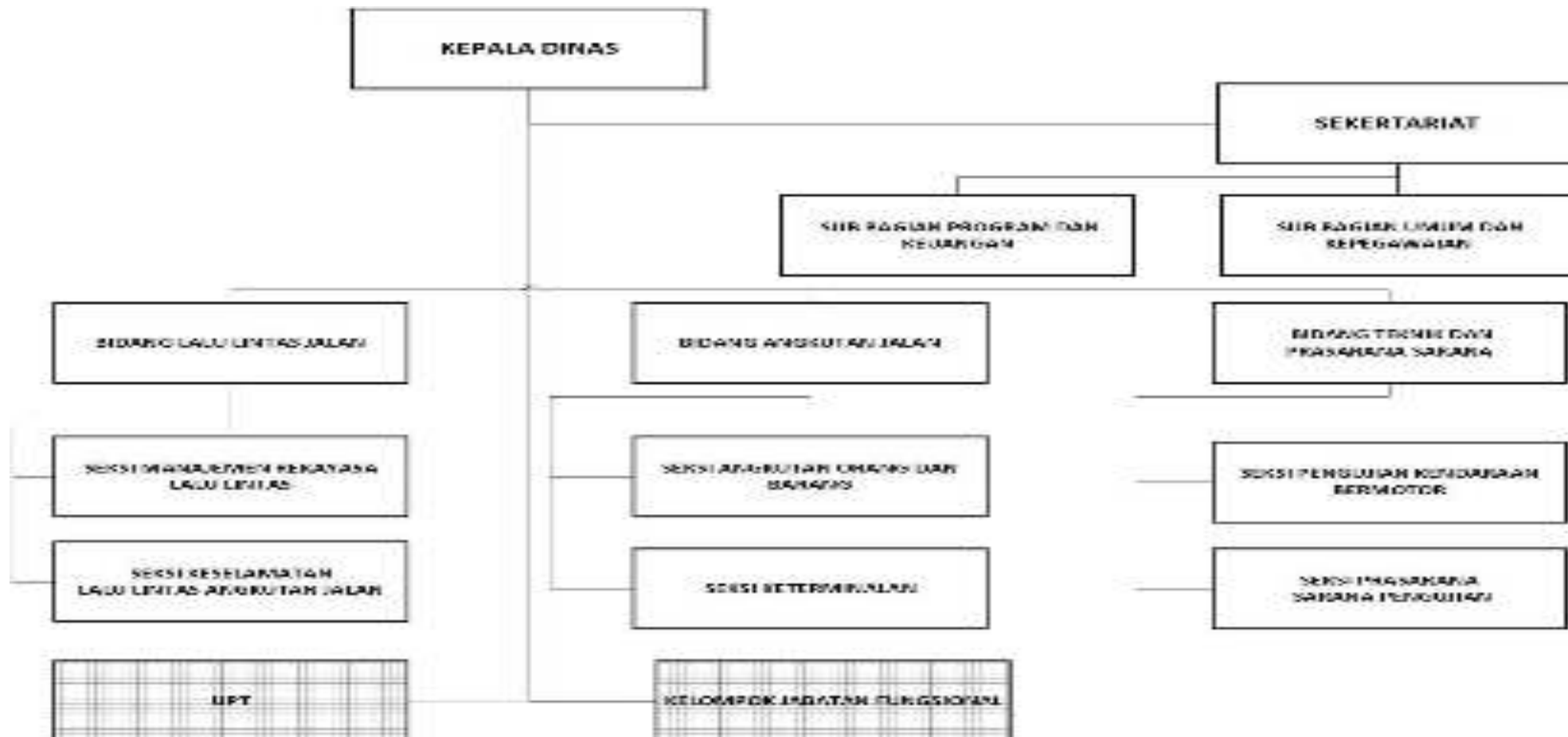
Adapun tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Program dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- c. Bidang Angkutan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:
  1. Seksi Angkutan Orang dan Barang
  2. Seksi Keterminalan
- d. Bidang Teknik Sarana Prasarana Pengujian membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
  2. Seksi Prasarana dan Sarana Pengujian

Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sesuai dalam Lampiran I Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan dapat kami sajikan pada gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Gambar 2.1  
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan



Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dibebankan pada 14 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 9 jabatan

Rincian Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

Tugas Pokok : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe , perparkiran dan kesekretariatan;  
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;  
3. Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;  
4. Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;  
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perhubungan;  
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;  
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;  
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran; dan  
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Nama Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

- Fungsi
- : 1. Melaksanakan pengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perhubungan;
  2. Melaksanakan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  3. Melaksanakan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dibidang kesekretariatan.
  4. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan;
  5. Melaksanakan pelayanan umum bidang-bidang perhubungan;
  6. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
  7. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  8. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
  9. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketataksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan dan kearsipan;
  10. Melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
  11. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  12. Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
  13. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang suberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan / atau dari pihak ketiga;
  14. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan;

15. Melaksanakan pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum sekretariat;
16. Melaksanakan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretraiat; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

Tugas Pokok : Melaksanakan Perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Manajemen rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas angkutan jalan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Lalu Lintas Jalan;
2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang manajemen rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
4. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
5. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
8. Audit dan inspeksi LLAJ di Jalan Kabupaten;
9. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
10. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang manajemen rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
11. Pelaksanaan Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas jalan

12. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas Jalan; dan
13. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN

Tugas Pokok : Melaksanakan Perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan orang dan barang, keterminaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

- Fungsi :
1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Angkutan Jalan;
  2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Angkutan Jalan;
  3. Pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
  4. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah kabupaten;
  5. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
  6. Penetapan rencana jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;
  7. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
  8. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
  9. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
  10. Penetapan tarif ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
  11. Fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan;
  12. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan angkutan jalan;

13. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang angkutan jalan;
14. Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan di bidang angkutan jalan;
15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Angkutan Jalan;
16. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan;
17. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG TEKNIK DAN PRASARANA SARANA

Tugas Pokok : Melaksanakan Perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengujian Bermotor, Prasarana sarana pengujian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Fungsi : 1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Teknik dan Prasarana Sarana;

2. Perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan prasarana sarana;

3. Pengujian kendaraan bermotor;

4. Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana sarana pengujian kendaraan bermotor;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan prasarana sarana pengujian kendaraan bermotor;

6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan prasarana sarana pengujian kendaraan bermotor;

7. Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan prasarana sarana pengujian kendaraan bermotor;

8. Pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Teknik dan Prasarana Sarana;
9. Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Teknik dan Prasarana Sarana; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

### 2.2.1. Potensi SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Perhubungan perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2021, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak : 49 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMP hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terdapat 12 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Kondisi Riil	Formasi	
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	3	3
		Kepala Seksi / Sub Bagian	IV.A	7	8
2	Fungsional Umum	JFU	-	30	126
3	Fungsional Tertentu	JFT		7	19
Jumlah				49	158

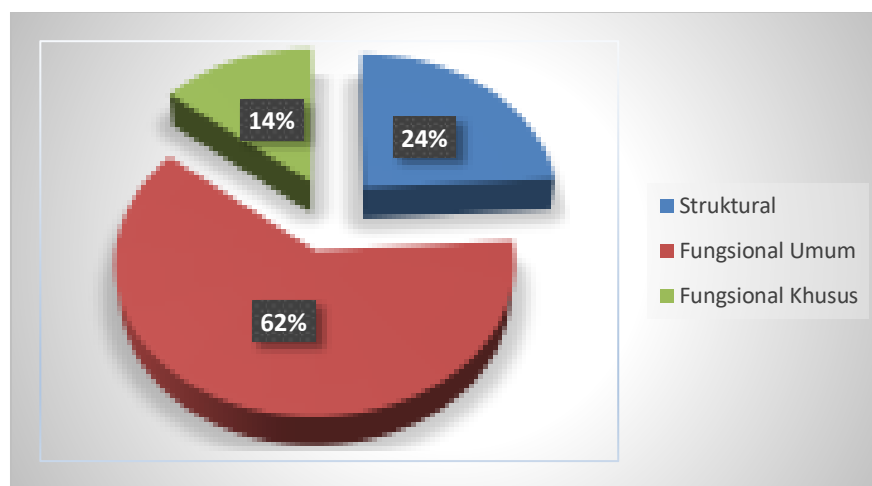
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Februari Tahun 2021



Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat komposisi SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang untuk Kelompok Jabatan Struktural sebesar 24%, Kelompok Jabatan Fungsional tertentu 14% dan Jabatan Fungsional Umum sebesar 62%. Adapun Gambar Komposisinya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2.

Komposisi SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Kelompok Jabatan



Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebanyak 49 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 12 orang pejabat struktural dan 37 orang pejabat fungsional umum/ fungsional khusus / fungsional tertentu. Keterbatasan jumlah ASN yang ditempatkan di Terminal dan beberapa sudah mulai mendekati masa purna tugas. Ditinjau dari kelompok jabatan fungsional khusus (JFK) masih ada kekurangan yang sangat krusial. Secara lebih rinci kekurangan personil dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2

Data Sumber Daya Manusia pada Bidang Teknik dan Prasarana Sarana sesuai Kelompok Jabatan Tahun 2021

No	Tenaga Penguji	Jumlah		
		Kebutuhan	Ada	Kurang
1	Jabatan Fungsional Pemula	6	0	6
2	Jabatan Fungsional Pelaksana	4	0	4
3	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	5	3	2
4	Jabatan Fungsional Penyelia	4	4	0
	<b>Total</b>	19	7	12

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Tahun 2021

Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Perhubungan mayoritas merupakan lulusan SLTA (50,94%). Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Magelang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

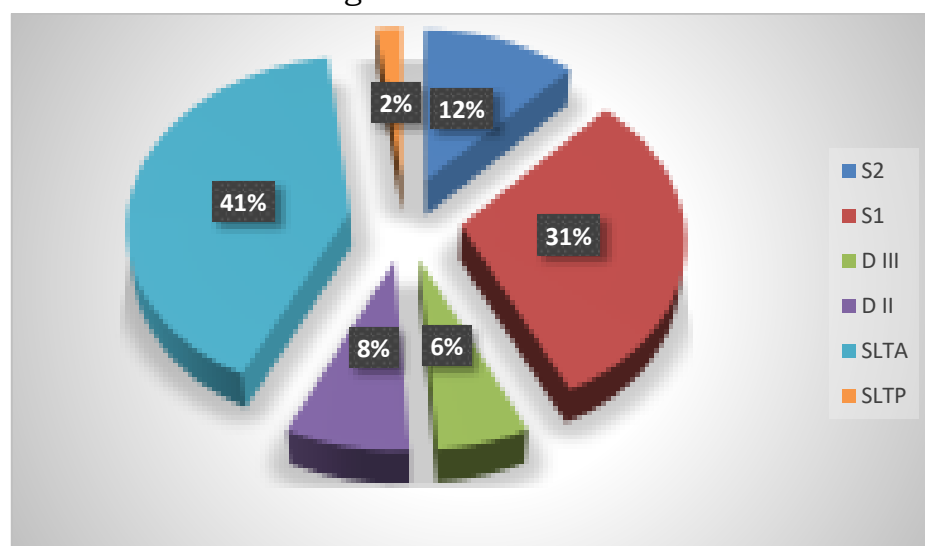
<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1	Pasca Sarjana (S.2)	6	12
2	Sarjana (S.1)	15	31
3	Diploma III / Akademi	3	6
4	Diploma II	4	8
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA)	20	41
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1	2
	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Februari Tahun 2021

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Perhubungan terdiri 1 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 20 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir, 4 orang berpendidikan Diploma II, 3 orang berpendidikan Diploma III , 15 orang berpendidikan Strata-1, dan 6 orang berpendidikan Strata-2/Magister dapat dilihat dalam gambar 2.3

Gambar 2.3

Komposisi Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Magelang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Sedangkan SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 55,10% dan golongan II

sebanyak 32,65%. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

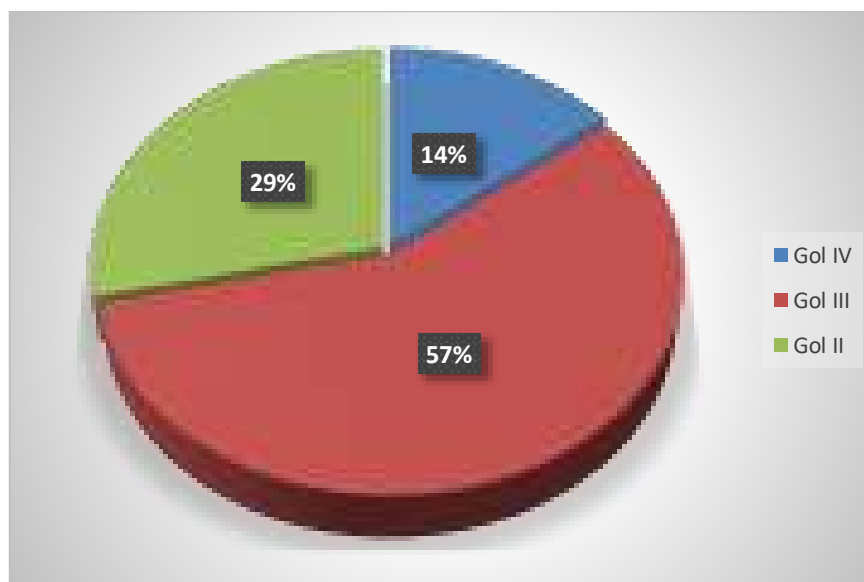
Tabel 2.4  
SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang  
Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	7	14
2.	Golongan III	28	57
3.	Golongan II	14	29
JUMLAH		49	100

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Februari Tahun 2021*

Komposisi SDM menurut golongan ruang aparatur dinas perhubungan golongan IV ada 7 orang, Golongan III ada 28 orang dan golongan II ada 14 orang. Gambar komposisinya dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut :

Gambar 2.4  
Komposisi SDM pada Dinas Perhubungan  
Kabupaten Magelang Menurut Golongan



*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021*

Sementara jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terdapat 49 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 9 pejabat struktural dan 30 jabatan fungsional umum / tertentu. Sedangkan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 pejabat struktural dan 7 jabatan fungsional umum / tertentu. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.5 berikut ini :

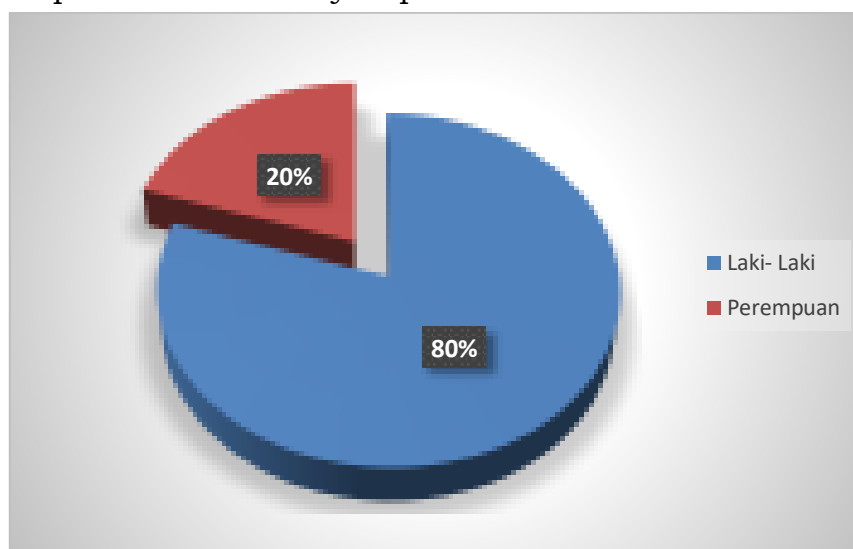
Tabel 2.5  
SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang  
Menurut Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pejabat Struktural	9	3
2.	Jabatan Fungsional Umum/ Tertentu	30	7
JUMLAH		39	10

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Februari Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 2.5 dapat digambarkan komposisi SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin untuk perempuan sebesar 20 % dan laki-laki sebesar 80 % seperti dalam gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5  
Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin



*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021*

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Data Rekapitulasi Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sesuai data rekonsiliasi tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

## Data rekonsiliasi Aset Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	JUMLAH	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.1		TANAH	-	-	11	3.966.941.870	
2		1.3.1.01	TANAH	11	3.966.941.870	-	-	
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	-	-	5.280	27.653.558.325	
4		1.3.2.01	ALAT BESAR	14	5.621.712.639	-	-	
5		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	45	2.354.447.025	-	-	
6		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	15	244.960.500	-	-	
7		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	13	11.840.000	-	-	
8		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.046	13.681.496.525	-	-	
9		1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	85	225.014.076	-	-	
10		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	
11		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	11	205.905.900	-	-	
12		1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	
13		1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	151	861.521.489	-	-	
14		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	
15		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	
16		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	
17		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	
18		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	
19		1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	
20		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	
21		1.3.2.18	RAMBU RAMBU	1.900	4.446.660.171	-	-	
22		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	76	20.003.239.615	
24		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	64	17.231.605.238	-	-	
25		1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-	
26		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	
27		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	12	2.771.634.377	-	-	
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	69	654.097.015	
29		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	
30		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	2	58.919.943	-	-	
31		1.3.4.03	INSTALASI	67	595.177.072	-	-	
32		1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	-	-	103	103.890.000	
34		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	
35		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-	-	-	
36		1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	
37		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	
38		1.3.5.05	TANAMAN	103	103.890.000	-	-	
39		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	JUMLAH	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	1	99.672.000	
42		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	99.672.000	-	-	
JUMLAH				5.540	52.481.398.825	5.540	52.481.398.825	

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Tahun 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7  
Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang  
Tahun 2018 – 2020

Nama Barang	2018			2019			2020		
	Jml	Baik	Rusak	Jml	Baik	Rusak/ mutasi	Jml	Baik	Rusak/ mutasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gedung Kantor	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Gedung PKB	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Terminal	6	6	0	6	6	0	6	6	0
Kendaraan Roda 4	7	7	0	7	7	0	8	8	0
Mobil truck (Crane)	1	1	0	2	2	0	2	2	0
Kendaraan Roda 2	24	24	0	25	25	0	25	25	0
Komputer	21	20	1	21	19	2	21	18	3
Laptop	15	15	0	15	15	0	15	14	1
Printer	26	26	0	34	29	5	34	29	5
LCD	2	2	0	2	1	1	3	2	1
Mesin Ketik	10	8	2	10	8	2	10	7	3
HT	19	17	2	19	16	3	19	15	4
Mesin Fax	1	1	0	1	1	0	1	1	0
AC	5	5	0	13	13	0	13	13	0
Alat PKB	22	12	10	24	14	10	24	14	0
Pemadam kebakaran	6	6	0	6	6	0	10	10	0
Genset	3	2	1	4	3	1	4	2	2
GPS	3	3	0	5	4	1	5	4	1
Meteran Roda	3	3	0	3	3	0	3	3	0
Pesawat RIG	2	1	1	2	1	1	2	1	1
TV	6	6	0	6	6	0	6	6	0
Kamera Digital	2	2	0	3	3	0	3	3	0
Gerobag Sampah	6	6	0	10	4	6	10	4	6

Nama Barang	2018			2019			2020		
	Jml	Baik	Rusak	Jml	Baik	Rusak/ mutasi	Jml	Baik	Rusak/ mutasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mesin pemotong rumput	1	1	0	2	2	0	2	2	0

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Tahun 2021

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Perhubungan

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode tahun sebelumnya menurut indikator yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tahun 2020 -2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang  
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	-	-	-	68,96	75,62	82,62	89,54	96,49	96,46	53,89	55,85



Berdasarkan tabel 2.8 diatas, Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 1 (satu) indikator kinerja pembangunan daerah yaitu Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2020 apabila dikaitkan dengan target RPJMD dapat dicapai dengan 4 indikator program , meliputi :

- 1) Presentasae peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan
- 2) Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas
- 3) Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas
- 4) Persentase peningkatan angkutan umum laik jalan

Pada Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi terhadap Capaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2020 . Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan indikator kinerja. Kriteria untuk penilaian indicator kinerja terbagi dalam 4 kriteria, antara lain :

No	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Satuan Evaluasi Kinerja
1	Tercapai	Apabila realisasi capaian indicator pada Tahun 2020 lebih dari 100% terhadap Target Akhir Renstra
2	Akan tercapai	Apabila realisasi capaian indicator pada Tahun 2020 dalam interval lebih dari 20% sampai dengan kurang dari 100% terhadap Target Akhir Renstra.
3	Perlu Upaya Keras	Apabila realisasi capaian indicator pada Tahun 2020 dalam interval kurang dari 20% terhadap Target Akhir Renstra
4	Not Available	Indikator belum ada informasi data

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2020 apabila disandingkan dengan Target RPJMD dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 2.9  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Target PD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja PRJMD s.d Tahun 2020	Status
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan pembangunan Infrastruktur Perhubungan	94,46	68,96	53,89	53,89	Akan Tercapai

Pada table 2.9 menunjukkan bahwa Kinerja Urusan Perhubungan ditunjukkan dalam 1 (satu) indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan capaian indikator kinerja target 68,96% terealisasi 53,89% berstatus akan tercapai. Adapun rincian capaian per indikator dapat ditampilkan sbb :

- 1) Presentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan target kinerja 81,10% capaian kinerja 78,41% apabila disandingkan dengan target akhir renstra capainnya 78,41% maka hasil evaluasi kinerja akan tercapai.
- 2) Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas target kinerja 59,69% capaian kinerja 46,40% apabila disandingkan dengan target akhir renstra capainnya 46,40% maka hasil evaluasi kinerja akan tercapai.
- 3) Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas target kinerja 43,69% capaian kinerja 29,80% apabila disandingkan dengan target akhir renstra capainnya 32,44% maka hasil evaluasi kinerja akan tercapai.
- 4) Persentase peningkatan angkutan umum laik jalan target kinerja 91,38% capaian kinerja 60,96% apabila disandingkan dengan target akhir renstra capainnya 64,80% maka hasil evaluasi kinerja akan tercapai.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah :

- a. Perencanaan kegiatan/program yang baik.
- b. Dukungan ketersediaan dana.
- c. Pelaksanaan kegiatan/program yang baik.
- d. Sarana dan prasarana mendukung.

Sedangkan factor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai yaitu :

- a. Presentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan, Indikator ini belum tercapai dikarenakan 2 (dua) unit halte yang seharusnya terbangun difocusing untuk penanganan *covid-19*;

- b. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, Indikator ini belum tercapai dikarenakan belanja modal perlengkapan jalan seperti Rambu, LPJU, *Guardrail*, Marka Jalan dan Zebra Cross seharusnya terbangun difocusing untuk penanganan *covid-19*;
- c. Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, Indikator ini belum tercapai karena adanya anjuran pemerintah untuk mengurangi mobilitas / PSBB sehingga kegiatan bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum dan pelajar ditiadakan;
- d. Persentase peningkatan angkutan umum laik jalan, Indikator ini belum tercapai karena selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pengujian kendaraan bermotor tutup karena pandemi *covid-19* dan sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah kendaraan yang diuji dibatasi hanya 60 (enam puluh) kendaraan setiap hari.

Tabel 2.10  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 -2024**

Program/ Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN ke- (dalam ribuan rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.743.438.000	2.415.112.000	2.729.588.000	2.564.727.000	3.055.081.000	1.084.063.817	39,51
Penyediaan jasa surat menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	89.055.000	97.960.000	107.757.000	118.500.000	130.000.000	63.692.970	71,52
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.000.000	132,848,123	53,14
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	302.216.000	432.437.000	365.681.000	402.249.000	442.474.000	135.395.450	44,80

Program/ Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN ke- (dalam ribuan rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	593.427.000	632.942.000	672.260.000	713.322.000	760.401.000	325.665.999	54,88
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	394.153.000	419.261.000	433.071.000	455.381.000	472.391.000	224.753.590	57,02
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	601.210.000	401.410.000	401.554.000	401.702.000	401.875.000	191.424.490	31,84
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	513.377.000	156.102.000	446.765.000	140.823.000	481.940.000	10.283.195	2,00

Program/ Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN ke- (dalam ribuan rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.779.000	282.151.000	297.943.000	315.051.000	334.278.000	118.725.663	44,34
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	197.779.000	212.151.000	227.943.000	245.051.000	219.278.000	72.188.413	36,50
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	21.851.515	43,70
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0,00
Program peningkatan pelayanan angkutan	1.075.000.000	1.075.000.000	8.575.000.000	6.075.000.000	1.075.000.000	782.404.421	72,78
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	1.000.000.000	1.000.000.000	8.500.000.000	6.000.000.000	1.000.000.000	538.989.961	53,90

Program/ Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN ke- (dalam ribuan rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	243.414.460	324,55
Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	636.593.407	31,05
Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	7.914.100	3,96
Pengelolaan Parkir	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	204.132.422	68,04
Survey Potensi Parkir	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	424.546.885	84,91
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00

Program/ Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN ke- (dalam ribuan rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	38.115.911.000	38.671.401.000	38.275.040.000	38.486.343.000	37.621.776.000	22.063.979.514	57,89
Pengamanan Lalu Lintas untuk Acara Tertentu	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	54.828.470	28,86
Pengembangan Pelayanan Angkutan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	45.639.695	20,28
Pembayaran Rekening LPJU	19.000.800.000	19.000.800.000	19.000.800.000	19.000.800.000	19.000.800.000	17.504.253.349	92,12
Pengelolaan LPJU	14.043.900.000	14.799.390.000	14.398.029.000	14.609.332.000	13.744.765.000	3.576.459.636	25,47
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	495.056.650	14,14
Peningkatan Keselamatan LLAJ	1.106.211.000	906.211.000	911.211.000	911.211.000	911.211.000	386.683.514	34,96
Fasilitasi Koordinasi LLAJ	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.058.200	2,12
<b>JUMLAH</b>	44.252.128.000	44.493.664.000	51.927.571.000	49.491.121.000	63.136.135.000	24.685.766.822	55,78



Dari Tabel 2.10 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 rasio antara realisasi dan target anggaran dalam renstra capaiannya sebesar 55,78%. Adapun rincian capaian realisasi program dan target program dalam renstra, adalah sbb :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah target dalam Renstra Rp. 2.743.438.000,00 teralisasi Rp. 1.084.063.817,00 capaian 39,51% (tercapai), namun apabila dilihat dalam kegiatan yang tidak tercapai dalam program ini adalah kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara serapan hanya 2,00% hal ini dikarenakan adanya kendala Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target dalam Renstra Rp. 267.779.000,00 teralisasi Rp. 118.725.663,00 capaian 44,34% (tercapai). Pada Program ini ada satu kegiatan yang tidak mendukung yaitu kegiatan Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah karena pagu anggaran di nihilkan dampak dari refocussing.
3. Program peningkatan pelayanan angkutan target dalam Renstra Rp. 1.075.000.000,00 teralisasi Rp. 782.404.421,00 capaian 72,78% (tercapai).

#### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Transportasi

Transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan. Panjang jalan menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah, semakin panjang suatu jalan maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian. Menurut statusnya jalan terbagi menjadi 3 kategori yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Magelang, Panjang Jalan Nasional/Negara 36.400 km, Jalan Provinsi 118.677 km dan Jalan Kabupaten 1.000.825 km.



Gambar 2.6  
Situasi lalu lintas di Jalan Mayjen Bambang Sugeng

Kondisi geografis Kabupaten Magelang yang terdiri dari kawasan dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik di Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten dari Tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel 2.11

Tabel 2.11  
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan  
Tahun 2017-2020

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah pada tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Rambu-rambu lalu lintas	2.457	2.457	2.574	2.681	buah
2	Marka Jalan	11.435	11.660	11.660	11.660	meter
3	Traffic light (APILL)	18	18	18	18	buah
4	Guardrail (pagar pengaman)	4.748	5.104	5.104	5.104	beam
5	Zebra Cross	10	20	20	20	lokasi
6	Halte	9	11	12	12	buah
7	Lampu Penerangan Jalan Umum	2.499	2.610	2.610	2.962	titik

### 2.3.3. Jumlah Terminal

Jumlah terminal yang dikelola Dinas Perhubungan tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12.

Pengelolaan Terminal Tahun 2017-2020

TAHUN	TERMINAL TIPE LAYANAN B	TERMINAL TIPE LAYANAN C
2017		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminal Borobudur</li><li>2. Terminal Salaman</li><li>3. Terminal Secang</li><li>4. Terminal Grabag</li><li>5. Terminal Tegalrejo</li></ol>
2018		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminal Borobudur</li><li>2. Terminal Salaman</li><li>3. Terminal Secang</li><li>4. Terminal Grabag</li><li>5. Terminal Tegalrejo</li></ol>
2019		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminal Borobudur</li><li>2. Terminal Salaman</li><li>3. Terminal Secang</li><li>4. Terminal Grabag</li><li>5. Terminal Tegalrejo</li><li>6. Terminal Bandongan</li></ol>
2020		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminal Borobudur</li><li>2. Terminal Salaman</li><li>3. Terminal Secang</li><li>4. Terminal Grabag</li><li>5. Terminal Tegalrejo</li><li>6. Terminal Bandongan</li></ol>

Sumber data : Seksi Keterminalan, 2020

Terminal di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) tipe terminal, yaitu tipe A, Terminal tipe B dan terminal tipe C yang telah dipisahkan kewenangannya menjadi milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pada tabel 2.12 dapat disampaikan bahwa pada tahun 2017 ada pengurangan 1 buah terminal Tipe B yaitu terminal Muntilan,

hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang membagi terminal berdasarkan kewenangan pengelolaan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang juga membangun 1 buah Terminal Tipe C di Bandongan dan memindahkan kewenangan dalam pengelolaan terminal tipe B ke Propinsi yaitu Terminal Drs. Soeprajitno, dengan demikian di tahun 2018 Dinas Perhubungan tetap mengelola 6 buah Terminal Tipe C yang tersebar dalam 6 wilayah yaitu Borobudur, Salaman, Tegalrejo, Secang, Grabag dan Bandongan.

#### 2.3.4. Jumlah Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum

Tabel 2.13.

Jumlah Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum dan Jumlah Juru Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2017 - 2020

Tahun	Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum	Pendapatan Retribusi
	(lokasi)	(Rp.)
2017	193	464.795.500
2018	175	609.002.600
2019	225	817.211.000
2020	238	482.246.832

Sumber data : UPT Parkir, 2020

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa kenaikan pendapatan sampai dengan tahun 2019, untuk tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi covid-19 sehingga banyak pertokoan dan pusat perbelanjaan tutup dimasa pandemi yang mengakibatkan turunnya jumlah pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.

#### 2.3.5. Jumlah Pelayanan Kendaraan Bermotor

Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis di jalan setiap kendaraan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang memiliki 1 unit Pengujian Kendaraan Bermotor dengan 7 penguji kendaraan. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan yang melakukan uji kendaraan 2017 -2020 sebagaimana disajikan pada tabel 2.14

Tabel 2.14.

Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Kendaraan

Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kendaraan bermotor yang diuji	20.267	18.832	19.491	14.369
2	Kendaraan bermotor wajib uji	20.598	21.376	21.688	23.572
3	Persentase	98,39	88,10	89,87	60,96

*Sumber data : Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2020*

Jumlah pelayanan kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan tahun 2020 mengalami penurunan terbanyak dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan pelayanan pengujian tutup selama 3 bulan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2021, dan selanjutnya terdapat pembatasan jumlah kendaraan uji hanya 60 kendaraan setiap harinya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Kondisi tersebut dapat merupakan suatu tantangan maupun peluang yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Tantangan maupun peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan meliputi :

##### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan Dinas Perhubungan;
2. Semakin rendahnya minat masyarakat pengguna transportasi umum;
3. Meningkatnya kemacetan jalan perkotaan yang diakibatkan oleh bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi;
4. Semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
5. Kebutuhan prasarana transportasi yang semakin meningkat;
6. Belum adanya data inventaris perlengkapan jalan;
7. Semakin banyaknya jasa transportasi online yang belum jelas aturan hukumnya;
8. Banyaknya petugas parkir yang belum sesuai dengan standar yang ditentukan;
9. Masih lemahnya penegakan hukum bidang perhubungan;

10. Data dan informasi perhubungan belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan;
11. Pandemi covid-19 yang belum berakhir sampai dengan pertengahan tahun 2021 yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan dan berdampak pada bidang perhubungan.

#### 2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan;
2. Infrastruktur jalan yang sudah mendukung;
3. Rencana Pengembangan aglomerasi kawasan strategi pariwisata dan purwomanggung;
4. Banyaknya lahan parkir dan area yang potensial untuk dijadikan lahan parkir ditepi jalan umum;
5. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Magelang;
6. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara;
7. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan emisi gas buang menjadi isu internasional;
8. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah transportasi melalui dana corporate social responsibility (CSR);
9. Transportasi mendukung tercapainya pola dan struktur RTRW di berbagai aspek.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera berdaya saing dan amanah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil cukup menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta Faktor – faktor yang mempengaruhi, dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 3.1

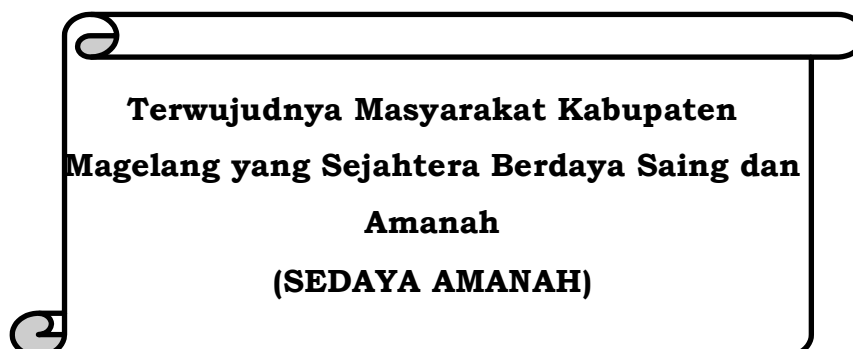
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan : Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Belum optimalnya pengelolaan terminal Penumpang tipe C
			Belum optimalnya sarana angkutan umum
			Belum optimalnya layanan trayek angkutan umum.
			Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan
			Masih rendahnya disiplin penyelenggaraan parkir
			Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
			Belum Optimalnya pengawasan dampak lalu lintas terhadap pembangunan pusat kegiatan
			Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan
			Belum optimalnya penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang**

Bupati Magelang menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera berdaya saing dan amanah. Adapun visi pembangunan Tahun 2019 – 2024 adalah :



Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan pada kurun waktu 2019-2024 akan melaksanakan misi kedua yaitu **“Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”**.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.



Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Perhubungan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DISHUB	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	<p>Misi: Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup</p> <p>PROGRAM: Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ</p>	<p>TUGAS : menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang perhubungan yang menjadi ke wenangan Daerah dan Tugas Pem bantuan yang di berikan kepada Daerah.</p> <p>FUNGSI : perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya jumlah trayek terlayani angkutan umum.</li> <li>- Munculnya juru parkir yang tidak mempunyai izin (jukir liar)</li> <li>- Belum optimalnya pengamanan dan keselamatan lalulintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna transportasi pedesaan yang masih ada meskipun cenderung menurun</li> <li>- Adanya aturan perundang - undangan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi</li> <li>- Sudah ada jaringan CCTV yang tersebar di persimpangan</li> </ul>	<p>Belum adanya dokumen rencana induk jaringan transportasi</p> <p>Belum optimalnya kelembagaan yang mendukung tugas dan fungsi keamanan dan keselamatan lalulintas</p> <p>Belum semua APILL terkoneksi dengan ITCS</p>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Renstra K/L

Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

## Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi	Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan parkir	Belum optimalnya ketersediaan prasarana angkutan jalan	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
2	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	Perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, perparkiran, dan kesekretariatan	Belum optimalnya keamanan dan keselamatan lalu lintas	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas pendukung transportasi
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan	Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan			

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		konektivitas antarwilayah	terminal tipe C, dan perparkiran			
3	Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal		Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran	Belum optimalnya layanan angkutan	Terus dikembangkan sarana prasarana dan pelayanan angkutan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	Belum dilaksanakan adanya evaluasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan
4	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah	Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis	Belum optimalnya ketersediaan prasarana angkutan jalan	Pengoptimalan sarana prasarana dan SDM yang dimiliki	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
	efisien dan ramah lingkungan	lingkungasebagai antisipasi terhadap perubahan iklim				pendukung unit pengujian kendaraan bermotor

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 5 Tahun 2011, Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan - perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa rencana program/ kegiatan sudah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis KLHS ditampilkan dalam tabel 3.4.

Permasalahan pelayanan OPD beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.4 :

Tabel 3.4  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
<b>I</b>	<b>RTRW</b>				
A	Pola Ruang RTRW				
	Memastikan pola tata ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030	Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan	Belum adanya komunikasi aktif antar perangkat daerah	Sinergitas pelayanan di sektor Perhubungan	Sisten jaringan jalan yang belum memadai
B	Struktur Ruang RTRW				
	Pengembangan jaringan jalan nasional bebas hambatan bagian dari ruas Yogyakarta – Bawen.		Belum dikembangkan jaringan jalan nasional bebas hambatan bagian ruas Bawen-Yogyakarta	Renstra Dishub Provinsi Jateng	Pembebasan lahan

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	Pengembangan jaringan jalan nasional Semarang - Yogyakarta		Dikembangkan jaringan jalan Nasional Semarang-Yogyakarta, namun beberapa titik masih menjadi simpul kemacetan.	Renstra Dishub Provinsi Jateng	Keterbatasan lahan pengembangan
	Pengembangan jaringan jalan Provinsi:		Jalan rawan kecelakaan, dibutuhkan pemasangan perlengkapan jalan yang memadai	Renstra Dishub Provinsi Jateng	Keterbatasan lahan pengembangan
	Pemantapan ruas jalan Magelang-Bandongan – Wonosobo				
	Pemantapan ruas jalan Magelang – Purworejo				
	Pemantapan ruas jalan Magelang – Salatiga				
	Pemantapan ruas jalan Ketep – Borobudur				



No	Kebijakan RTRW dan KLHS		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
	Pengembangan jaringan jalan Kabupaten pada ruas jalan lingkaran Gulon – Ngawen -Pasar Muntilan.			Anggaran terbatas		
	Pengembangan prasarana terminal penumpang umum dan barang meliputi :				-	Keterbatasan Anggaran
		Terminal tipe C, dikembangkan di wilayah Kecamatan Secang, Grabag, Tegalrejo, Borobudur, Bandongan dan Salaman.		Keterbatasan pengembangan terminal	Orientasi kebijakan transportasi massal	Keterbatasan Anggaran
		Sub Terminal (Origin Destination) dikembangkan di Kecamatan Dukun, Sawangan, Windusari, Candimulyo, Mungkid, Bandongan, Ngluwar dan Kaliangkrik.		Di rencanakan pembangunan Sub Terminal OD di Kecamatan Dukun, Sawangan, Windusari, Candimulyo, dan Ngluwar		Terjadinya perubahan fungsi jalur kereta api lama untuk pemukiman, perdagangan dan lain - lain
		Terminal angkutan barang berupa :				

No	Kebijakan RTRW dan KLHS		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		Terminal kargo dikembangkan di Kecamatan sepanjang Secang-Magelang, Magelang - Muntilan, Muntilan - Salam dan Magelang - Salaman.		Kewenangan Pembangunan Terminal Barang dilakukan oleh pemerintah pusat (Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)		
		Pangkalan Truk dikembangkan di Kecamatan Secang, Tempuran, Muntilan dan diantara jalur Mungkid - Salam		Sulitnya mencari lahan yang strategis	Kepadatan angkutan truk di Kecamatan Tempuran karena sebagai zona industri	Keterbatasan Anggaran

No	Kebijakan RTRW dan KLHS		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		Pengembangan prasarana angkutan umum berupa Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan		Belum ada pengembangan prasarana angkutan umum		
		Pengembangan prasarana transportasi kereta api meliputi revitalisasi jaringan jalur kereta api Semarang – Magelang - Yogyakarta dan pengembangan kereta api komuter Semarang - Magelang dan Magelang - Yogyakarta.		Belum ada pengembangan prasarana transportasi kereta api.		
<b>II</b>	<b>KLHS</b>					
A	Permasalahan dan Isu Strategis					
	Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif			Sulitnya mencari lahan yang strategis	Orientasi kebijakan transportasi massal	Keterbatasan lahan strategis

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	Uji emisi yang dilakukan secara berkala untuk monitoring emisi kendaraan		Keterbatasan sarana alat uji kendaraan bermotor	Orientasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan	Keterbatasan prasarana sarana alat uji kendaraan
	Perbaiki sistem transportasi		Rendahnya load factor kendaraan angkutan umum	Orientasi kebijakan transportasi massal; evaluasi dan penataan jaringan trayek secara berkala.	Banyaknya kendaraan pribadi; pemberlakuan pembatasan kendaraan s/d 25 tahun.
	Area hijau disekitar lokasi pembangunan pengembangan terminal		-	Orientasi kebijakan pengurangan efek gas rumah kaca	Keterbatasan lahan strategis
	Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan		Keterbatasan fasilitas perlengkapan jalan	Orientasi kebijakan keselamatan berkendara	Keterbatasan anggaran

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	Keterpaduan sistem jaringan jalan dan manajemen lalu lintas		Belum adanya rencana induk jaringan jalan	Orientasi kebijakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	-

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional, maupun regional. Rumusan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang akan dijalankan serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai berikut:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	Satuan	Tahun						KONDISI AKHIR KINERJA	
				2020		2021	2022	2023	2024	2024	
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Penetapan Renstra											
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah									
		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	%	68,97	53,89	75,62	na	na	na	na	na
Perubahan Renstra											
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah									
		Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	%	na	na	na	59,35	62,34	90,00	90,00	



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan meruakan rumusan perencanaan tentang bagaimana melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Tabel 5.1.

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)		
MISI 2	:	Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1		2	3	4
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.
				Peningkatan Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten / Kota
				Peningkatan ketersediaan Perlengkapan Jalan

			Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir
			Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
			Peningkatan pengawasan dampak lalu lintas terhadap pembangunan pusat kegiatan
			Peningkatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ
			Peningkatan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, maka Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kerja program, kegiatan, Sub Kegiatan target program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				2020			2021		2022		2023		2024		Target	Rp.				
				Target	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	na persen	29.812.338.020,00	72,48 persen	26.479.709.333,00	78,16 persen	26.435.788.951,00	93,05 persen	28.017.743.687,00	93,05 persen	28.017.743.687,00						
			Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	na %	na %	28.479.663.069	50,35%	29.812.338.020,00	59,35%	26.479.709.333,00	62,34%	26.435.788.951,00	90,00%	28.017.743.687,00	90,00%	28.017.743.687,00				
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1. Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD	na %	na %	5.992.746.435	50,00%	6.361.263.100,00	66,67%	5.530.053.363,00	83,33%	5.180.410.231,00	100,00%	5.812.364.967,00	100,00%	5.812.364.967,00			
			2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kespagaiaian PD	na %	na %		50,00%		66,67%		83,33%		100,00%		100,00%					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	46.537.250	12 bulan	38.969.920,00	12 bulan	38.750.000,00	12 bulan	38.750.000,00	12 bulan	38.750.000,00	12 bulan	38.750.000,00			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Renja PD yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	21.851.515	2 dokumen	9.271.000,00	2 dokumen	5.000.000,00	2 dokumen	5.000.000,00	2 dokumen	5.000.000,00	2 dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			2. Jumlah Dokumen Renstra Perubahan PD yang Tersusun	- dokumen	- dokumen		1 dokumen		- dokumen		- dokumen		- dokumen		- dokumen					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	13 dokumen	13 dokumen	24.685.735	13 dokumen	29.698.920,00	13 dokumen	33.750.000,00	13 dokumen	33.750.000,00	13 dokumen	33.750.000,00	13 dokumen	33.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribunalan yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	3.866.084.660	12 bulan	5.076.584.000,00	12 bulan	4.300.873.363,00	12 bulan	4.149.383.231,00	12 bulan	4.781.337.967,00	12 bulan	4.781.337.967,00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	na Pegawai	na Pegawai	3.793.896.247	53 Pegawai	4.889.548.000,00	53 Pegawai	4.118.751.363,00	53 Pegawai	3.967.261.231,00	53 Pegawai	4.599.215.967,00	53 Pegawai	4.599.215.967,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Pengelola Keuangan PD		0	-	12 bulan	96.508.000,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	n/a bulan	n/a bulan	72.188.413	n/a bulan	6.146.000,00	12 bulan	182.122.000,00	12 bulan	182.122.000,00	12 bulan	182.122.000,00	12 bulan	182.122.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi yang Disusun		0	-	12 dokumen	64.073.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun		0	-	1 dokumen	20.309.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0%	0	-	50,00%	226.093.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen survey potensi pendapatan		0	-	2 dokumen	197.798.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG	
			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen data retribusi daerah		0	-	1 dokumen	28.295.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		0	-	12 bulan	141.240.000,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah seragam dan atribut ASN yang terbeli		0	-	153 set	141.240.000,00	- set	0	- set	0	- set	0	- set	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	1.274.587.476	12 bulan	92.383.000,00	12 bulan	90.000.000,00	12 bulan	140.000.000,00	12 bulan	140.000.000,00	12 bulan	140.000.000,00					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket	na paket	135.395.450	1 paket	45.000.000,00	0 paket	0	1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	na kali	na kali	143.131.318	57 kali	47.383.000,00	57 kali	90.000.000,00	57 kali	90.000.000,00	57 kali	90.000.000,00	57 kali	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID			
	2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	na kali	na kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali		8 kali							
	3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na kali	na kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali							

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	na bulan	na bulan	190.523.659	12 bulan	236.873.180,00	12 bulan	277.940.000,00	12 bulan	277.940.000,00	12 bulan	277.940.000,00	12 bulan	277.940.000,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat yang dikelola 2. Jumlah arsip yang dikelola	na surat na jenis arsip	na surat na jenis arsip	63.692.970	6400 surat 2 jenis arsip	50.993.180,00	6400 surat 2 jenis arsip	62.060.000,00	6400 surat 2 jenis arsip	62.060.000,00	6400 surat 2 jenis arsip	62.060.000,00	6400 surat 2 jenis arsip	62.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbarkan	na bulan	na bulan	126.830.689	12 bulan	185.880.000,00	12 bulan	215.880.000,00	12 bulan	215.880.000,00	12 bulan	215.880.000,00	12 bulan	215.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	na bulan	na bulan	615.013.390	12 bulan	549.120.000,00	12 bulan	822.490.000,00	12 bulan	574.337.000,00	12 bulan	574.337.000,00	12 bulan	574.337.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	na Kendaraan na Kendaraan	na Kendaraan na Kendaraan	198.031.420	25 Kendaraan 8 Kendaraan	263.230.100,00	25 Kendaraan 8 Kendaraan	290.041.000,00	27 Kendaraan 8 Kendaraan	290.041.000,00	27 Kendaraan 8 Kendaraan	290.041.000,00	27 Kendaraan 8 Kendaraan	290.041.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	na paket	na paket	-	1 paket	5.348.000,00	1 paket	2.000.000,00	1 paket	2.000.000,00	1 paket	2.000.000,00	1 paket	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	na paket	na paket	26.722.170	1 paket	46.421.900,00	1 paket	34.143.000,00	1 paket	34.143.000,00	1 paket	34.143.000,00	1 paket	34.143.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	na m2	na m2	390.259.800	57633 m2	234.120.000,00	57633 m2	496.306.000,00	57633 m2	248.153.000,00	57633 m2	248.153.000,00	57633 m2	248.153.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)</b>	1. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan 2. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengaman dan keselamatan lalu lintas 3. Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KDWU 4. Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji 5. Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas 6. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengaman dan keselamatan lalu lintas 7. Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	na % na % na % 91,38 % 43,69 % 59,69 % 81,10 %	na % na % na % 91,38 % 43,69 % 59,69 % 81,10 %	22.486.916.634	na % na % na % 91,70 % 55,73 % 69,24 % 85,82 %	23.451.074.920,00	25,00 % 88,06 % 65,00 % na % na % na % na %	20.949.655.970,00	25,00 % 94,03 % 68,00 % na % na % na % na %	21.255.378.720,00	100,00 % 100,00 % 70,00 % na % na % na % na %	22.205.378.720,00	100,00 % 100,00 % 70,00 % na % na % na % na %	22.205.378.720,00		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0	21.583.683.735	88,06 %	20.681.206.000,00	88,06 %	18.410.525.000,00	94,03 %	18.490.525.000,00	100,00 %	19.090.525.000,00	100,00 %	19.090.525.000,00		
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Halte yang Terbangun	0	0	-	1 halte	100.000.000,00	- halte	0	2 halte	80.000.000,00	2 halte	80.000.000,00	2 halte	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah PJU yang terbangun 2. Jumlah rambu yang terbangun 3. Jumlah guardrail yang terbangun 4. Jumlah marka jalan yang terbangun 5. Jumlah zebracross yang terbangun	352 titik 107 buah - meter - meter - lokasi	352 titik 107 buah - meter - meter - lokasi	4.071.516.286	286 titik 30 buah - meter - meter - lokasi	1.686.863.000,00	- titik - buah - meter - meter - lokasi	240.000.000,00	100 titik 100 buah 100 meter 500 meter 2 lokasi	240.000.000,00	100 titik 100 buah 100 meter 500 meter 2 lokasi	240.000.000,00	100 titik 100 buah 100 meter 500 meter 2 lokasi	240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah halte yang terpelihara	na halte	na halte	7.914.100	- halte	0	2 halte	20.000.000,00	2 halte	20.000.000,00	2 halte	20.000.000,00	2 halte	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1. Jumlah LPJU yang terpelihara 2. Jumlah rekening PJU yang terbarkan 3. Jumlah trafficlight yang terpelihara	na titik 3 rayon 1 paket	na titik 3 rayon 1 paket	17.504.253.349	3000 titik 3 rayon 1 paket	18.894.343.000,00	3000 titik 3 rayon 1 paket	18.150.525.000,00	5630 titik 3 rayon 1 paket	18.150.525.000,00	5730 titik 3 rayon 1 paket	18.750.525.000,00	5730 titik 3 rayon 1 paket	18.750.525.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan layanan terminal type C	na %	na %	424.546.885	na %	735.000.000,00	50,00 %	785.000.000,00	75,00 %	835.000.000,00	100,00 %	1.185.000.000,00	100,00 %	1.185.000.000,00		
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen DED, Andalain, UKL - UPL yang disusun	na dokumen	na dokumen	-	- dokumen	0	- dokumen	0	6 dokumen	50.000.000,00	- dokumen	400.000.000,00	- dokumen	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG

Pembangunan Gedung Terminal	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN SALAMAN, KECAMATAN BOROBUDUR, KECAMATAN SECANG
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang direhabilitasi	na terminal	na terminal	-	- terminal	0	3 terminal	50.000.000,00	3 terminal	50.000.000,00	3 terminal	50.000.000,00	3 terminal	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang dikelola	46 Pegawai	46 Pegawai	424.546.885	46 Pegawai	735.000.000,00	46 Pegawai	735.000.000,00	46 Pegawai	735.000.000,00	46 Pegawai	735.000.000,00	46 Pegawai	735.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	na %	na %	-	84,75%	225.236.000,00	89,83%	225.000.000,00	94,92%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00	100,00%	225.000.000,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir yang dikelola	230 titik	230 titik	204.132.422	250 titik	225.236.000,00	265 titik	225.000.000,00	280 titik	225.000.000,00	295 titik	225.000.000,00	295 titik	225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	na %	na %	-	na %	931.432.420,00	65,00 %	771.288.920,00	68,00 %	818.288.920,00	70,00 %	818.288.920,00	70,00 %	818.288.920,00		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Kendaraan yang diuji	na kendaraan	na kendaraan	323.010.961	14.018 kendaraan	486.030.920,00	15.452 kendaraan	430.030.920,00	16.301 kendaraan	486.030.920,00	16.920 kendaraan	486.030.920,00	16.920 kendaraan	486.030.920,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
	2. Jumlah Dokumen IS Pengadaan Tanah Gedung Uji	- Dokumen	- Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		1 Dokumen		- Dokumen		1 Dokumen			
	3. Jumlah Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Gedung Uji	- dokumen	- dokumen		- dokumen		- dokumen		- dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
	4. Jumlah Paket Pengadaan Tanah Gedung Uji	- Paket	- Paket		- Paket		- Paket		- Paket		1 Paket		1 Paket			
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji	na set	na set	215.979.000	14018 set	283.418.000,00	15452 set	283.418.000,00	16301 set	283.418.000,00	16920 set	283.418.000,00	16920 set	283.418.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	-	9 kali	102.893.500,00	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji	12 alat uji	12 alat uji	243.414.460	12 alat uji	59.090.000,00	12 alat uji	57.840.000,00	12 alat uji	48.840.000,00	12 alat uji	48.840.000,00	12 alat uji	48.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	na %	na %	442.570.184	na %	792.478.000,00	33,33 %	737.842.050,00	66,67 %	822.564.800,00	100,00%	822.564.800,00	100,00%	822.564.800,00		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	-	- dokumen	0	- dokumen	0	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah operasi laik jalan	76 kali	76 kali	441.511.984	48 kali	778.558.000,00	48 kali	717.842.050,00	48 kali	772.564.800,00	48 kali	772.564.800,00	48 kali	772.564.800,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
	2. Jumlah Posko Angkutan Lebaran, natal dan Tahun baru	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan forum LLAJ	2 kali	2 kali	1.058.200	2 kali	13.920.000,00	2 kali	20.000.000,00	2 kali	20.000.000,00	2 kali	20.000.000,00	2 kali	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan ketepatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	0	-	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	39.000.000,00	100,00%	39.000.000,00	100,00%	39.000.000,00		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	-	- dokumen	0	- dokumen	0	1 dokumen	19.000.000,00	1 dokumen	19.000.000,00	1 dokumen	19.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KECAMATAN MUNGKID
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	0	-	- dokumen	0	- dokumen	0	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	-	- dokumen	0	- dokumen	0	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan layanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	na	na	45.639.695	4,95%	85.722.500,00	7,43%	20.000.000,00	9,90%	25.000.000,00	12,38%	25.000.000,00	12,38%	25.000.000,00		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek	2 trayek	2 trayek	45.639.695	20 trayek	85.722.500,00	20 trayek	20.000.000,00	20 trayek	25.000.000,00	20 trayek	25.000.000,00	20 trayek	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	KABUPATEN MAGELANG
<b>Jumlah</b>				<b>28.479.663.069</b>		<b>29.812.338.020,00</b>		<b>26.479.709.333,00</b>		<b>26.435.788.951,00</b>		<b>28.017.743.687,00</b>		<b>28.017.743.687,00</b>		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang merujuk pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV serta indikator program pada Bab VI. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yaitu Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan.

Secara lengkap indikator kinerja utama, kondisi awal dan target capaiannya (2021-2024) sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.1.

TABEL 7.1  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	%	68,97	53,89	75,62	Na	Na	Na	Na	Na
2	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	%	Na	Na	Na	59,35	62,34	90,00	90,00	90,00

Pada tabel 7.1 dapat kita sampaikan bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pada kondisi awal kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan sedangkan IKU Dinas Perhubungan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan dengan target Capaian di tahun 2022 sebesar 59,35 %, tahun 2023 sebesar 62,34 % dan diakhir tahun 2024 sebesar 90,00 %.

Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja dapat ditampilkan dalam tabel 7.2.



**TABEL 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2020		2021	2022	2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1. Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD	na %	na %	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	
	2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian PD	na %	na %	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>12 bulan</b>	12 bulan	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2020		2021	2022	2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Renja PD yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah Dokumen Renstra Perubahan PD yang Tersusun	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>terlaksana</b>								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	na Pegawai	na Pegawai	53 Pegawai	53 Pegawai	53 Pegawai	53 Pegawai	53 Pegawai	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Pengelola Keuangan PD		0	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	n/a bulan	n/a bulan	n/a bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi yang Disusun		0	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun		0	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0%	0	50,00%	0%	0%	0%	0%	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen survey potensi pendapatan		0	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen data retribusi daerah		0	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		0	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah seragam dan atribut ASN yang terbeli		0	153 set	- set	- set	- set	- set	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>12 bulan</b>	12 bulan	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan	na paket	na paket	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DINAS PERHUBUNGAN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	gedung kantor								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	na kali	na kali	57 kali	57 kali	57 kali	57 kali	57 kali	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	na kali	na kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	
	3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na kali	na kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	na bulan	na bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat yang dikelola	na surat	na surat	6400 surat	6400 surat	6400 surat	6400 surat	6400 surat	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah arsip yang dikelola	na jenis arsip	na jenis arsip	2 jenis arsip	2 jenis arsip	2 jenis arsip	2 jenis arsip	2 jenis arsip	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya	na bulan	na bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	DINAS PERHUBUNGAN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Air dan Listrik yang terbayarkan								
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>na bulan</b>	<b>na bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	na Kendaraan	na Kendaraan	25 Kendaraan	25 Kendaraan	27 Kendaraan	27 Kendaraan	27 Kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	na Kendaraan	na Kendaraan	8 Kendaraan	8 Kendaraan	8 Kendaraan	8 Kendaraan	8 Kendaraan	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	na paket	na paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	na paket	na paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DINAS PERHUBUNGAN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2020		2021	2022	2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	na m2	na m2	57633 m2	57633 m2	57633 m2	57633 m2	57633 m2	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	1. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	na %	na %	na %	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%	
	2. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	na %	na %	na %	88,06%	94,03%	100,00%	100,00%	
	3. Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	na %	na %	na %	65,00%	68,00%	70,00%	70,00%	
	4. Persentase layanan uji	91.38 %	91.38 %	91.70 %	na %	na %	na %	na %	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2020		2021	2022	2023			2024
		Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kendaraan bermotor wajib uji								
	5. Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	43.69 %	43.69 %	55.73 %	na %	na %	na %	na %	
	6. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	59.69 %	59.69 %	69.24 %	na %	na %	na %	na %	
	7. Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	81.10 %	81.10 %	85.82 %	na %	na %	na %	na %	
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		0	88,06%	88,06%	94,03%	100,00%	100,00%	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan	Jumlah Halte yang Terbangun		0	1 halte	- halte	2 halte	2 halte	2 halte	DINAS PERHUBUNGAN



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kabupaten/Kota									
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah PJU yang terbangun	352 titik	352 titik	286 titik	- titik	100 titik	100 titik	100 titik	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah rambu yang terbangun	107 buah	107 buah	30 buah	- buah	100 buah	100 buah	100 buah	
	3. Jumlah guardrail yang terbangun	- meter	- meter	- meter	- meter	100 meter	100 meter	100 meter	
	4. Jumlah marka jalan yang terbangun	- meter	- meter	- meter	- meter	500 meter	500 meter	500 meter	
	5. Jumlah zebracross yang terbangun	- lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah halte yang terpelihara	na halte	na halte	- halte	2 halte	2 halte	2 halte	2 halte	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1. Jumlah LPJU yang terpelihara	na titik	na titik	3000 titik	3000 titik	5630 titik	5730 titik	5730 titik	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	3 rayon	3 rayon	3 rayon	3 rayon	3 rayon	3 rayon	3 rayon	
	3. Jumlah trafficlight yang terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>	<b>na %</b>	<b>na %</b>	<b>na %</b>	<b>50.00 %</b>	<b>75.00 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>layanan terminal type C</b>								
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen DED, Andalalin, UKL - UPL yang disusun	na dokumen	na dokumen	- dokumen	- dokumen	6 dokumen	- dokumen	- dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Gedung Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang direhabilitasi	na terminal	na terminal	- terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	DINAS PERHUBUNGAN
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang dikelola	46 Pegawai	46 Pegawai	46 Pegawai	46 Pegawai	46 Pegawai	46 Pegawai	46 Pegawai	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>na %</b>	<b>na %</b>	<b>84,75%</b>	<b>89,83%</b>	<b>94,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah titik parkir yang dikelola	230 titik	230 titik	250 titik	265 titik	280 titik	295 titik	295 titik	DINAS PERHUBUNGAN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kabupaten/Kota									
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	na %	na %	na %	65.00 %	68.00 %	70.00 %	70.00 %	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Kendaraan yang diuji	na kendaraan	na kendaraan	14.018 kendaraan	15.452 kendaraan	16.301 kendaraan	16.920 kendaraan	16.920 kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah Dokumen FS Pengadaan Tanah Gedung Uji	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	
	3. Jumlah Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Gedung Uji	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	4. Jumlah Paket Pengadaan Tanah Gedung Uji	- Paket	- Paket	- Paket	- Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	
Penyediaan Bukti Lulus	Jumlah bukti	na set	na set	14018 set	15452 set	16301 set	16920 set	16920 set	DINAS

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	lulus uji								PERHUBUNGAN
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	9 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji	12 alat uji	12 alat uji	12 alat uji	12 alat uji	12 alat uji	12 alat uji	12 alat uji	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	na %	na %	na %	33.33 %	66.67 %	100,00%	100,00%	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk		0	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah operasi laik jalan	76 kali	76 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Jumlah Posko Angkutan Lebaran, natal dan Tahun baru	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan forum LLAJ	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase Peningkatan ketercapaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		0	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		0	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Inspeksi,	Jumlah		0	- dokumen	- dokumen	1	1	1	DINAS

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Audit dan Pemantauan Terminal	dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					dokumen	dokumen	dokumen	PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		0	- dokumen	- dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan layanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	na	na	4,95%	7,43%	9,90%	12,38%	12,38%	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Daerah Kabupaten/Kota									
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek	2 trayek	2 trayek	20 trayek	20 trayek	20 trayek	20 trayek	20 trayek	DINAS PERHUBUNGAN

## BAB VIII PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang selama periode tersebut mengikuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dokumen Perubahan RPJMD, selanjutnya perubahan renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 2021  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Magelang



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip.: 197011151990031003



# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Soekarno-Hatta Telp. (0293) 785407 , Fax (0293) 3281091  
Kota Mungkid 56511  
Email : [distubkabmagelang@yahoo.co.id](mailto:distubkabmagelang@yahoo.co.id)

Kota Mungkid, 28 Mei 2021

Kepada Yth. :

Nomor : 006 / 2645 / 14 / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

.....  
.....  
di Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Juni 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : CC Room Dishub Kab. Magelang  
Acara : Forum Perangkat Daerah Membahas Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 - 2024

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG

**IMAM BASORI S. Sca., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701115 199003 1 003

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH**  
**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS**  
**PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan

1. Paparan materi Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 – 2024 oleh Sekretaris Dinas Perhubungan.
2. Tanggapan dan uraian dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021  
J a m e : 12.00 WIB  
Tempat : Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isi strategi (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tercantum pada tujuan dan sasaran Perubahan RPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat daerah kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan diakhiri untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Magelang, 2 Juni 2021

Kepala Perangkat Daerah  
Selaku Pimpinan Bidang  
Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Usaha Muda  
NIP. 19701115 199003 1 003

Mewakili Peserta Forum Peringkat Daerah  
 Penyusunan Rencana Peringkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang  
 Tahun 2019-2024

NO	Nama	Lembaga / Instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Eling Ancha Mah	DPRD	SANITAN	
2	Arif Yudianto	Wappda Lelungu	Kab Mgl	
3	FARIS BUDIMAN	POLEKAT MAGELANG	SANITAN	
4	Adi Ti Wibya	DPUPD	Magelang	
5	Krisna H.	BPPF VII-IV	Mgl.	
6	MUMI PRATIKA	ORGANON	MAGELANG	
7	Mansur Ebrana F	Diskominer	Magelang	
8	Rachy W	MA30	Cremisan	
9	Aprilia Dwi K	BPPKAD	Japuran	
10	U. Setyanwati	Kec. Bantur	Kec. Bantur / Bantur	

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH**

Hari : Rabu  
 Tanggal : 2 Juni 2019  
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB  
 Tempat : CC Ruang Dinas Perhubungan Kab. Magelang  
 Acara : Forum Perangkat Daerah Perubahan Rencana PD Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024

NO	NAMA	LP	LEMBAGA / INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	IMAM D	L	DJHUB			
2	ESKANDAR D	L	Potret			
3	Amilia S.K	P	DPRAD	Jayaman	0823774670	
4	Adi Triandya	L	DPWA	Mungji		
5	Faris Budiman	L	Potret MGL <small>kecamatan</small>	Sawitan	082433796	
6	Muhammad Rizki	L	DPRAD	Mungji	08572220 011	
7	R. Wibawa	L	BRPT MGL	Mgl		
8	Khrisna H	L			0857 2221 3193	
9	Arif Y	L	Bappeda	Kab Mgl		
10	Sigit Wicaksono	L	Ditahkot	Kab Mgl	08122222	
11	M. H. H. H.	L	Old Genda		08122222	
12	Gigit Sigit	L	Roda Genda	Mungji		
13	Ellyng Budik	P	DPRD	Sawitan	0857 2222 3193	
14	Eka Dwi L	L	DLH	Tamparan	08122222	
15	Mansur Chusni	L	Dikomin Fu	Mungji	08122222	
16	U. G. G.	P	Kec. Boreh	Boreh	08122222	
17	Randy Y	L	BPPD	Sawitan	08122222	
18	Fajar M	L	Dit. Hubs	Mland		
19	Edo Rizki	L	BPPD	Mgl	08122222	
20	M. S. A.	L	SPPD	Mland	08122222	

NO	NAMA	LP	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP	TANDA TAMBAH
1	2	3	4	5	6	7
21	Sekeloa yil	L	Ditubuh		0812111111	21
22	Siti Falaqih		Ditubuh			22
23	Dr. Wawan Anwarudin	P	Ditubuh			23
24	Widya Pratomo	P	Ditubuh		0812111111	24
25	B. Satrioatmodjo	L	Ditubuh			25
26	Ang. Mardiana	L	Ditubuh			26
27	Wahid Hidayat	L	Ditubuh	Purwokerto	0812111111	27
28	Wahid Hidayat	P				28
29	SURYONO					29
30	Nur Hidayat	P	Ditubuh			30
31	Lupandati L	P	Ditubuh			31
32	Suci R S	P	Ditubuh			32
33						33
34						34
35						35
36						36
37						37
38						38
39						39
40						40

Magelang, 2 Juni 2021

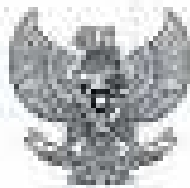
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG



INTAM HANORI S. Soe, M.Si

Perantara Utama Media

NIP. 19701119 198003 1 003



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/162/KEP/14/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diatapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kota Magelang  
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI MAGELANG,

td

ZAENAL ARIFFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,

  
M. TAWFIK S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/162/KEP/14/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	INAM BASORI, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	MARGONO, S.Sos., M.P.A.	Plt. Sekretaris pada Dinas Perhubungan	Sekretaris	
3.	SRI WULAN AMBARWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Program pada Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab Teknis	
4.	MARGONO, S.Sos., M.P.A.	Kepala Bidang Lalu lintas Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
5.	Drs. ISMAIL DEU	Kepala Bidang Teknik dan Prasarana Sarana Pengujian pada Dinas Perhubungan	Anggota	
6.	ARIF MUTHOHAR, S.T., M.T.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
7.	SUHUD JOKO PRAYITNO, S.H., M.M.	Kasi Prasarana Saran Pengujian pada Dinas Perhubungan	Anggota	
8.	SITI FATIMAH, S.E.	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	Anggota	
9.	B. SUDARYATMOKO, S.H.	Kasi Angkutan Orang dan Barang pada Dinas Perhubungan	Anggota	

1	2	3	4	5
10.	FAJAR BUDI PURWOKO, S.Sos.	Kasi Ketertarikan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
11.	MOCH TAROM, S.E.	Kasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan	Anggota	
12.	DEA SUSIYAWATI, S.E.	Kasublag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	Anggota	
13.	THOMY SUSANTO, S.M.	JFU pada Dinas Perhubungan	Petugas Teknis	
14.	RATNA AGUS SUAJI, S.T.	JFU pada Dinas Perhubungan	Petugas Teknis	
15.	SATRIYO PUNJUL, A.Ma.P.K.B.	JFU pada Dinas Perhubungan	Petugas Teknis	
16.	FAJAR TRIYANTO, A.Md.	JFU pada Dinas Perhubungan	Petugas Teknis	
17.	WENI PRABATIWI, M.N., A.Md.	JFU pada Dinas Perhubungan	Petugas Administrasi	
18.	ZAENAL ASYKAR, S.Sos.	JFU pada Dinas Perhubungan	Petugas Administrasi	

BUPATI MAGELANG,

td

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 PE. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
 KOMUNIKASI PIMPINAN,

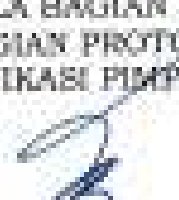
  
 M. TALUK, S.H., M.H.  
 Pembina/Tingkat I  
 NIP. 197103231990031003

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/162/KEP/14/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
 STRATEGIS DINAS DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024
2.	Sekretaris	Membantu tugas administrasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
3.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
4.	Anggota	Membantu melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
5.	Petugas Teknis	Melakukan tugas-tugas teknis dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024
6.	Petugas Administrasi	Melakukan tugas-tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
 PH. KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
 KOMUNIKASI PIMPINAN,

  
M. TAUFIK, S.H., M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197103231990031003

BUPATI MAGELANG,

td

ZAENAL ARIFIN

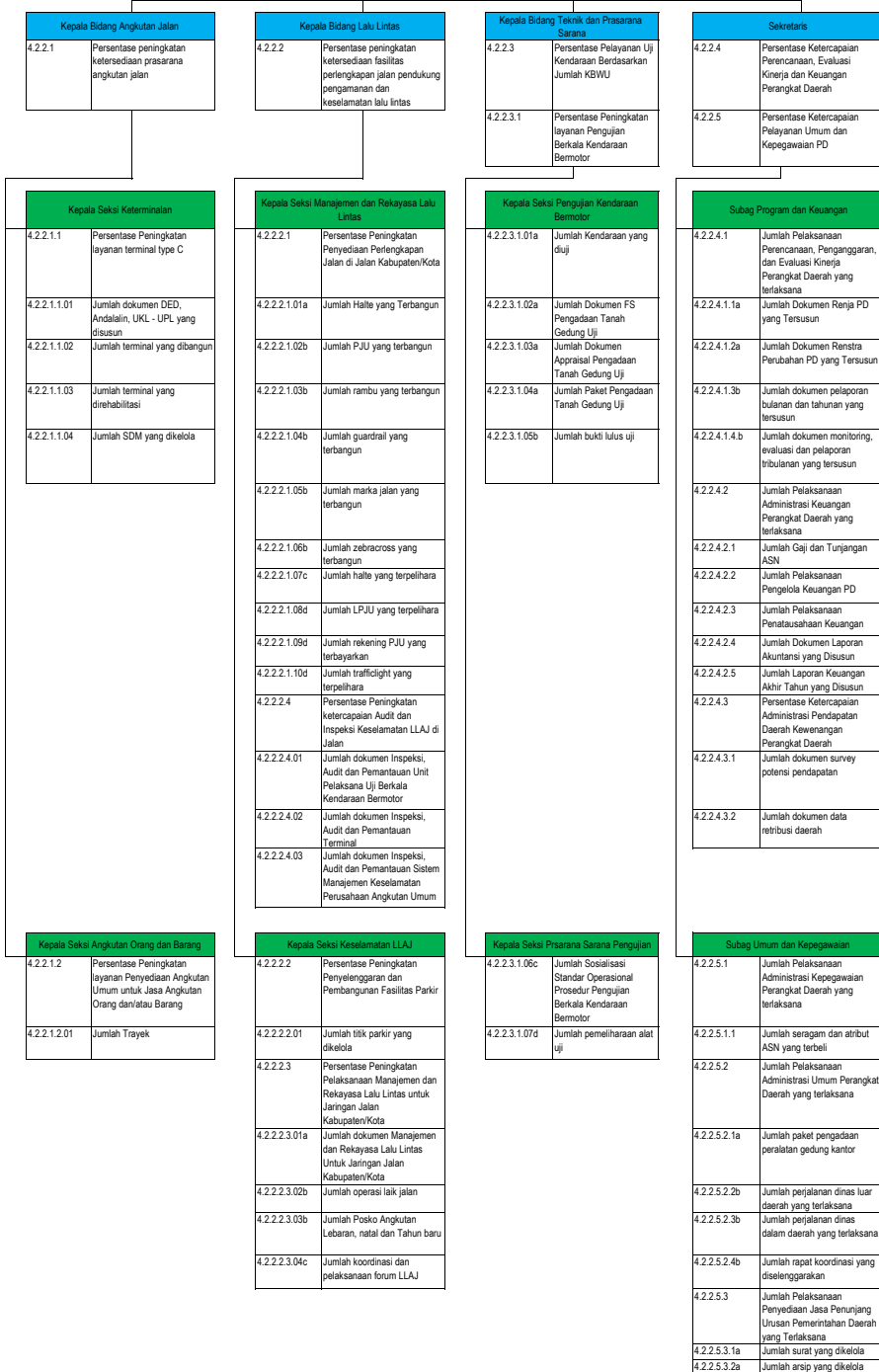
**POHON KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG**

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2019-2024

Penetapan: Peraturan Bupati Nomor : ..... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis

Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah" (SEDAYA AMANAH)
Misi	2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
TUJUAN	Meningkatnya daya saing daerah
Indikator Kinerja	4 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan
Sasaran	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur
Indikator Kinerja	4.2 Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah
<b>Kepala Perangkat Daerah - Dinas Perhubungan</b>	
Sasaran PD	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan
Indikator Kinerja	4.2.2 Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan



4.2.2.5.3.3b	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan
4.2.2.5.4	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana
4.2.2.5.4.1a	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara
4.2.2.5.4.2a	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara
4.2.2.5.4.3b	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
4.2.2.5.4.4c	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
4.2.2.5.4.5d	Luas gedung yang dipelihara

Catatan :

1. Kode diisi kode indikator kinerja yang telah disusun
2. Indikator diisi indikator kinerja sesuai dengan tingkatannya
3. Indikator kinerja diisi sesuai kewenangannya yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, apabila satu jabatan memiliki indikator yang berbeda level maka dapat dibedakan berdasarkan kode indikator.
4. Apabila indikator kinerja pada level kegiatan diampu oleh lebih dari 1 (satu) eselon IV, maka indikator tersebut ditarik ke eselon III.
5. Penataan bagan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah.

URUSAN	VISI	MISI	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA INDIKATOR	MASALAH POKOK DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR SASARAN DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH	ISU STRATEGIS PD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	FORMULA TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA SASARAN PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
UNTUK KE RPJMD		BAB V RPJMD	BAB IV RPJMD	BAB V,VI RPJMD	BAB V RPJMD		BAB IV RPJMD	BAB V,VI RPJMD	BAB V, VI, IX RPJMD	BAB IX RPJMD	BAB VI RPJMD	BAB VI RPJMD					BAB IV RPJMD	RENSTRA	BAB IX RPJMD	BAB IX RPJMD (IKU PD)
UNTUK KE RENSTRA							ISU STRATEGIS PD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	FORMULA TUJUAN							MASALAH POKOK	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	FORMULA SASARAN RENSTRA
3. Perhubungan	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Belum optimalnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah)/2	Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyeleng garan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3	Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyeleng garan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan perhubungan	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	(Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbbu)/3

MASALAH PD	STRATEGI PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	AKAR MASALAH PD	ARAH KEBIJAKAN PD	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB							
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
BAB IV RPJMD	BAB IV RPJMD	BAB VIII RPJMD	BAB VIII RPJMD	BANDINGKAN DGN RENSTRA & SIPPD YA...													
MASALAH OPD																	
Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	(((Jumlah ketersediaan prasarana angkutan jalan ( terminal ) / Jumlah kebutuhan ketersediaan prasarana angkutan jalan ( terminal ))) * 100%	Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang Tipe C,	Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Peningkatan layanan terminal type C	((( Jumlah Dokumen Pembangunan yang disusun dibagi jumlah kebutuhan Dokumen Pembangunan dikalikan 100)+ (Jumlah Terminal Yang Direhab dibagi jumlah kebutuhan rehab terminal dikalikan 100) +(Jumlah terminal yang dikelola dibagi Jumlah terminal )))/3	DISHUB							
							Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Jumlah Dokumen Yang Disusun								
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang direhabilitasi	Jumlah Terminal yang direhabilitasi								
							Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah terminal yang dikelola	Jumlah terminal yang dikelola								
							Belum optimalnya sarana angkutan umum	Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang/Barang yang dikelola	Jumlah Angkutan Orang/Barang yang dikelola
															Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang kelola	Jumlah Trayek yang kelola
															Belum Optimalnya Layanan Trayek Angkutan Umum	Peningkatan Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Izin Trayek/KP	Jumlah Rekomendasi Izin Trayek/KP								
							Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Peningkatan Ketersediaan perlengkapan jalan	Peningkatan Ketersediaan perlengkapan jalan		Peningkatan Ketersediaan perlengkapan jalan	Peningkatan Ketersediaan perlengkapan jalan	Peningkatan Ketersediaan perlengkapan jalan	Peningkatan Ketersediaan perlengkapan jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(((Jumlah Prasarana Jalan Yang Terbangun Dibagi Jumlah kebutuhan Prasarana Jalan Dikalikan 100)+( Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terbangun Dibagi Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Dikalikan 100)/2)
															Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun
															Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang terbangun	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terbangun
															Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terpelihara
															Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara
							Masih rendahnya disiplin penyelenggaraan parkir	Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir	Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir		Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir	Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir	Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir	Peningkatan disiplin penyelenggaraan parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah parkir yang dikelola/ jumlah potensi parkir dikali 100
															Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Parkir yang dikelola	Jumlah Parkir yang dikelola pada tahun n
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Parkir	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Parkir															
Belum Optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	(Jumlah Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas/ Jumlah kebutuhan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas*100)+(Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian, Posko lebaran , natal tahun baru / jumlah kebutuhan Operasi Pengawasan dan Pengendalian, Posko lebaran , natal tahun baru *100)+( Jumlah Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas Dibagi Jumlah Kebutuhan Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas * 100)/3								
							Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
							Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian, Posko Lebaran Natal dan Tahun Baru	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian, Posko Lebaran Natal dan Tahun Baru								
							Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas								

MASALAH PD	STRATEGI PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	AKAR MASALAH PD	ARAH KEBUJAKAN PD	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
					Belum optimalnya pengawasan dampak lalu lintas terhadap pembangunan pusat kegiatan	Peningkatan pengawasan dampak lalu lintas terhadap pembangunan pusat kegiatan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	{((Presentase Jumlah Rapat Koordinasi Penilaian Hasil Andalalin Dibagi Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi Dikalikan 100)+(Presentase Jumlah Pusat Kegiatan Pembangunan Yang Diawasi Dibagi Jumlah Kebutuhan Pusat Kegiatan Pembangunan Dikalikan 100)/2}	
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen atau regulasi Perda Perbub Andalalin	Jumlah Dokumen atau regulasi Perda Perbub Andalalin yang ditetapkan	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rapat Koordinasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rapat Koordinasi Penilaian Hasil Andalalin yang terselenggara	
							Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan terhadap pembangunan atau Pusat Kegiatan yang berandalalin.	Jumlah Pusat kegiatan, pembangunan yang diawasi	
					Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.	Peningkatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Peningkatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	{(Presentase Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dibagi Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dikalikan 100)+(Presentase Jumlah Terminal Yang Diaudit Dibagi Jumlah Kebutuhan Terminal Dikalikan 100)+(Presentase Jumlah Angkutan Umum Yang Diaudit Dibagi Jumlah Kebutuhan Angkutan Umum Dikalikan 100)/3}	
							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terselenggara	
							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah terminal	Jumlah terminal yang diaudit	
							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Audit manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Angkutan umum yang diaudit	
			3. Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbwu	(Cakupan Kendaraan Bermotor yang diuji / Cakupan kendaraan bermotor wajib uji )*100%	Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(Jumlah KBWU Yang Di Uji Dibagi Jumlah KBWU dikalikan 100)	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah KBWU Yang Di Uji	Jumlah KBWU Yang Di Uji	
							Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jmlah Bukti Lulus Uji	Jumlah Cetakan Bukti Lulus Uji	
							Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi	
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat uji Yang Dipelihara	Jumlah Sarana Prasarana Uji Kendaraan Bermotor Yang Dipelihara	



CODING INDIKATOR KINERJA SAMPAI DENGAN INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran PD		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Kode PD	KETERANGAN		
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17		
4	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	4.2	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	4.02:02	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	4.2.2.1	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	4.2.2.1.1	Persentase Peningkatan layanan terminal type C	4.2.2.1.1.01	Jumlah dokumen DED, Andalin, UKL - UPL yang disusun	14	4.2.2.1.1.01.14		
										4.2.2.1.1.02	Jumlah terminal yang dibangun	14	4.2.2.1.1.02.14		
										4.2.2.1.1.03	Jumlah terminal yang direhabilitasi	14	4.2.2.1.1.03.14		
										4.2.2.1.1.04	Jumlah SDM yang dikelola	14	4.2.2.1.1.04.14		
								4.2.2.1.2	Persentase Peningkatan layanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	4.2.2.1.2.01	Jumlah Trayek	14	4.2.2.1.2.01.14		
								4.2.2.2	Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	4.2.2.2.1	Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.2.2.2.1.01a	Jumlah Halte yang Terbangun	14	4.2.2.2.1.01a.14
												4.2.2.2.1.02b	1. Jumlah PJU yang terbangun	14	4.2.2.2.1.02b.14
												4.2.2.2.1.03b	2. Jumlah rambu yang terbangun	14	4.2.2.2.1.03b.14
						4.2.2.2.1.04b	3. Jumlah guardrail yang terbangun					14	4.2.2.2.1.04b.14		
						4.2.2.2.1.05b	4. Jumlah marka jalan yang terbangun					14	4.2.2.2.1.05b.14		
						4.2.2.2.1.06b	5. Jumlah zebracross yang terbangun					14	4.2.2.2.1.06b.14		
						4.2.2.2.1.07c	Jumlah halte yang terpelihara					14	4.2.2.2.1.07c.14		
						4.2.2.2.1.08d	1. Jumlah LPJU yang terpelihara	14	4.2.2.2.1.08d.14						
						4.2.2.2.1.09d	2. Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	14	4.2.2.2.1.09d.14						
						4.2.2.2.1.10d	3. Jumlah trafflight yang terpelihara	14	4.2.2.2.1.10d.14						
4.2.2.2.2	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4.2.2.2.2.01	Jumlah titik parkir yang dikelola	14	4.2.2.2.2.01.14										
4.2.2.2.3	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.2.2.2.3.01a	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14	4.2.2.2.3.01a.14										

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran PD		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Kode PD	KETERANGAN
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17
										4.2.2.3.02b	1. Jumlah operasi laik jalan	14	4.2.2.3.02b.14
										4.2.2.3.03b	2. Jumlah Posko Angkutan Lebaran, natal dan Tahun baru	14	4.2.2.3.03b.14
										4.2.2.3.04c	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan forum LLAJ	14	4.2.2.3.04c.14
								4.2.2.4	Persentase Peningkatan ketercapaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4.2.2.4.01	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	14	4.2.2.4.01.14
										4.2.2.4.02	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	14	4.2.2.4.02.14
										4.2.2.4.03	Jumlah dokumen Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	14	4.2.2.4.03.14
						4.2.2.3	Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	4.2.2.3.1	Persentase Peningkatan layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.2.2.3.1.01a	1. Jumlah Kendaraan yang diuji	14	4.2.2.3.1.01a.14
										4.2.2.3.1.02a	2. Jumlah Dokumen FS Pengadaan Tanah Gedung Uji	14	4.2.2.3.1.02a.14
										4.2.2.3.1.03a	3. Jumlah Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Gedung Uji	14	4.2.2.3.1.03a.14
										4.2.2.3.1.04a	4. Jumlah Paket Pengadaan Tanah Gedung Uji	14	4.2.2.3.1.04a.14
										4.2.2.3.1.05b	Jumlah bukti lulus uji	14	4.2.2.3.1.05b.14
										4.2.2.3.1.06c	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14	4.2.2.3.1.06c.14
										4.2.2.3.1.07d	Jumlah pemeliharaan alat uji	14	4.2.2.3.1.07d.14
						4.2.2.4	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	4.2.2.4.1	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	4.2.2.4.1.1a	1. Jumlah Dokumen Renja PD yang Tersusun	14	4.2.2.4.1.1a.14
										4.2.2.4.1.2a	2. Jumlah Dokumen Renstra Perubahan PD yang Tersusun	14	4.2.2.4.1.2a.14
										4.2.2.4.1.3b	1. Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	14	4.2.2.4.1.3b.14
										4.2.2.4.1.4.b	2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	14	4.2.2.4.1.4.b.14
								4.2.2.4.2	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	4.2.2.4.2.1	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	4.2.2.4.2.1.14
										4.2.2.4.2.2	Jumlah Pelaksanaan Pengelola Keuangan PD	14	4.2.2.4.2.2.14
										4.2.2.4.2.3	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	14	4.2.2.4.2.3.14
										4.2.2.4.2.4	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi yang Disusun	14	4.2.2.4.2.4.14
										4.2.2.4.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	14	4.2.2.4.2.5.14
								4.2.2.4.3	Persentase Ketercapaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.2.2.4.3.1	Jumlah dokumen survey potensi pendapatan	14	4.2.2.4.3.1.14
										4.2.2.4.3.2	Jumlah dokumen data retribusi daerah	14	4.2.2.4.3.2.14
						4.2.2.5	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian PD	4.2.2.5.1	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	4.2.2.5.1.1	Jumlah seragam dan atribut ASN yang terbeli	14	4.2.2.5.1.1.14

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran PD		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Kode PD	KETERANGAN
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17
								4.2.2.5.2	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	4.2.2.5.2.1a	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	14	4.2.2.5.2.1a.14
										4.2.2.5.2.2b	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	14	4.2.2.5.2.2b.14
										4.2.2.5.2.3b	2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	14	4.2.2.5.2.3b.14
										4.2.2.5.2.4b	3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	14	4.2.2.5.2.4b.14
								4.2.2.5.3	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	4.2.2.5.3.1a	1. Jumlah surat yang dikelola	14	4.2.2.5.3.1a.14
										4.2.2.5.3.2a	2. Jumlah arsip yang dikelola	14	4.2.2.5.3.2a.14
										4.2.2.5.3.3b	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	14	4.2.2.5.3.3b.14
								4.2.2.5.4	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	4.2.2.5.4.1a	1. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	14	4.2.2.5.4.1a.14
										4.2.2.5.4.2a	2. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	14	4.2.2.5.4.2a.14
										4.2.2.5.4.3b	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	14	4.2.2.5.4.3b.14
										4.2.2.5.4.4c	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	14	4.2.2.5.4.4c.14
										4.2.2.5.4.5d	Luas gedung yang dipelihara	14	4.2.2.5.4.5d.14



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	% INDIKATOR PROGRAM				INDIKATOR SASARAN PD (DISHUB)	FORMULA INDIKATOR SASARAN PD (DISHUB)	%SASARAN SKPD				INDIKATOR SASARAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	
16	17	18	2021	2022	2023	2024		13	2021	2022	2023	2024	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	((Jumlah ketersediaan prasarana angkutan jalan (terminal)) / Jumlah kebutuhan ketersediaan prasarana angkutan jalan (terminal, ))*100%	0.00	25.00	25.00	100.00	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	(Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbwu)/3	50.35	59.35	62.34	90.00	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan
	2. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	((Jumlah ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ( Rambu, halte,Marka, Zebra cross, Guardrail, PJU) ) / Jumlah kebutuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ( Rambu, halte, Marka, Zebra cross, Guardrail, PJU) )*100%	88.06	88.06	94.03	100.00							
	3. Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbwu	(Cakupan Kendaraan Bermotor yang diuji / Cakupan kendaraan bermotor wajib uji )*100%	63.00	65.00	68.00	70.00							

**TENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PIHAK BERTANGGUNG DAERAH  
DIKAS PERHUBUNGAN  
KAWILUPRI MADIJARA**

No	Nama	Kategori	Maksud dan Tujuan	Lokasi Koridor Koridor Koridor	Tipe Kegiatan dan Kegiatan								Tipe dan Kategori Koridor	Koridor
					Tipe				Kegiatan					
					1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1	Koridor 1
2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2	Koridor 2
3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3	Koridor 3
4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4	Koridor 4
5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5	Koridor 5

Region	District	Sub-District	Type of the Project	Name of the Project	Budgetary Allocation (in million Rupiah)										Total Allocation	Remarks	
					2020		2021		2022		2023		2024				
					Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned			

Region	Province	District	Type of Beneficiary	Type of Beneficiary	Beneficiary Data										Total Beneficiaries	Total Beneficiaries		
					Male		Female		Total		Male		Female				Total	
					Count	%	Count	%	Count	%	Count	%	Count	%			Count	%
Region 1	Province 1	District 1	Beneficiary Type 1	Beneficiary Category 1	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 2	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 3	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
Region 2	Province 2	District 2	Beneficiary Type 1	Beneficiary Category 1	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 2	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 3	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
Region 3	Province 3	District 3	Beneficiary Type 1	Beneficiary Category 1	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 2	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 3	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
Region 4	Province 4	District 4	Beneficiary Type 1	Beneficiary Category 1	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 2	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 3	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
Region 5	Province 5	District 5	Beneficiary Type 1	Beneficiary Category 1	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 2	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 3	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
Region 6	Province 6	District 6	Beneficiary Type 1	Beneficiary Category 1	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 2	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		
				Beneficiary Category 3	100	100%	100	100%	200	100%	100	100%	100	100%	200	100%		



Project	Location	Code	Project Name/Description	Sub-Category	Financial Data										Total Available Budget	Status
					2019		2020		2021		2022		2023			
					Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan		
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status
			Project Name/Description	Sub-Category	2019 Actual	2019 Plan	2020 Actual	2020 Plan	2021 Actual	2021 Plan	2022 Actual	2022 Plan	2023 Actual	2023 Plan	Total Available Budget	Status

Region	District	Sub-District	Type of Beneficiary	Type of Beneficiary (Detailed)	Beneficiary Data										Total Beneficiaries	Total Value (Rp)
					2018		2019		2020		2021		2022			
					Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual		
Jember	Kecamatan	Desa	Penerima Manfaat	Beneficiary 1	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 2	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 3	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 4	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
Jember	Kecamatan	Desa	Penerima Manfaat	Beneficiary 5	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 6	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 7	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
Jember	Kecamatan	Desa	Penerima Manfaat	Beneficiary 8	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 9	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 10	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 11	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
Jember	Kecamatan	Desa	Penerima Manfaat	Beneficiary 12	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 13	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 14	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 15	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
Jember	Kecamatan	Desa	Penerima Manfaat	Beneficiary 16	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 17	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 18	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000
				Beneficiary 19	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	1000	950	4000	4000000000

Region	Country	Code	Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	Financial Summary (Amount in USD Millions)										Total Project Cost (USD Millions)	Status
					2010		2011		2012		2013		2014			
					Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual		
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Short Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status

Region	Country	Code	Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	Financial Summary (Million USD)										Total Project Cost (Million USD)	Status
					2010		2011		2012		2013		2014			
					Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual		
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status
			Project Name and Description	Sector / Sub-Sector / Activity	2010 Target	2010 Actual	2011 Target	2011 Actual	2012 Target	2012 Actual	2013 Target	2013 Actual	2014 Target	2014 Actual	Total Project Cost	Status

Region	Country	Code	Type of Investment	Other Notes (e.g., Sector, Priority, or other relevant information)	Investment in transport infrastructure										Total investment in infrastructure	Total	
					Road		Rail		Air			Sea		Other			
					Actual	%	Actual	%	Actual	%	%	Actual	%	Actual			%
		Total			Actual	%	Actual	%	Actual	%	%	Actual	%	Actual	%	Total	

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
TINGKAS PEMERINTAHAN  
KABUPATEN MADIUN**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Penyediaan Layanan Pemerintahan	60,50 %	61,73 %	65,56 %	71,39 %	80,22 %

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
TINGKAS PEMERINTAHAN  
KABUPATEN MADIUN**

No	Indikator	Target Esplan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengentase Pelaksanaan Pencapaian, Distribusi Kinerja dan Kinerja PD	100 %	90,07 %	76,67 %	83,33 %	100,00 %
2.	Pengentase Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas dan Kepercayaan PD	100 %	90,02 %	66,07 %	83,33 %	100,00 %
3.	Pengentase Peringatan Denda dan Denda Jalan Lintas dan Arah Jalan	100 %	60,71 %	51,96 %	71,43 %	100,00 %